

BAB 4

DINAMIKA PPP, PAN DAN PKS

DI PENTAS NASIONAL DAN DAERAH

4.1 Dinamika dan Kondisi Mutakhir

Kehadiran partai politik di Indonesia bertujuan sebagai intermediasi. Seiring dengan tuntutan politik, keberadaan partai politik di Indonesia sudah sejak zaman kolonialisme Belanda. Namun kompetisi partai politik dalam pemilu sejak tahun 1955. Sebelum Pemilu 1977, Fusi Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia digabungkan pada tahun 1975 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, sehingga hanya menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya. Seiring dengan penyederhanaan partai politik, PPP dibentuk dari gabungan partai-partai politik Islam yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi pada 5 Januari 1973. Hasilnya, sejak Pemilu 1971 sampai Pemilu 1997, Golkar mendominasi Pemilu yang tidak demokratis.

Tan menggambarkan Polarisasi ideologi partai politik sejak runtuhnya Suharto telah berkisar dua kutub utama antara reformasi versus status quo dan Islam versus pluralisme (Tan, 2012: 154-179). Gambaran awal tentang ideologi Islam dalam partai politik dapat ditemukan dalam klaim PPP yang memiliki dua tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal berupa pijakan ideologi, nilai-nilai, norma, dan etika yang bersifat taktis

strategis PPP menjadi partai politik Islam, tetapi tidak menunjukkan relasi yang kuat antara jumlah mayoritas Muslim di Indonesia dengan rasio perolehan suara sejak pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997, menjelang runtuhnya Rezim Orde Baru (Aziz, 2006: 175). Kegagalan PPP disebabkan oleh masalah kelemahan internal dan perselisihan yang berlarut-larut di kalangan pengurus partai dan komponen-komponen partai membuat PPP mengalami kesulitan dalam proses penguatan kelembagaan partai (Kuntowidjojo, 2008 : 377).

Pesimisme tentang semboyan partai politik Agama yang menjual simbol agama seperti “politik amar ma’ruf nahi munkar” namun hanya akan menjadi utopianisme, bila tidak dilembakan dalam instrumentasi aspirasi. Kuntowidjojo menawarkan tiga obyektivitas partai. Pertama, “partai Islam plus” dengan orientasi ideologi yang berfariasi seperti Partai Islam Pembangunan, Partai Islam Demokratis; Kedua, partai tanpa nama Islam, namun lebih substantif memuat nilai-nilai Islam ke dalam Platform, Program, dan tindakan-tindakan; Ketiga, Partai campuran, dimana ummat Islam melibatkan ummat lainnya dalam keanggotaan partai politik namun tetap mempertahankan nilai-nilai Al-Quran dalam perumusan AD/ART sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang keormasan dan kepartaian (Kuntowidjojo, ibid. : 68).

Fakta-fakta tentang hasil pemilu di tahun 1955 memposisikan Partai Masyumi (Majelis Permusyawaratan Muslim Indonesia) sebagai partai Islam modernis, Partai Nahdlatul Ulama sebagai Partai Islam Tradisional. Platform partai-partai politik Islam adalah pembentukan Negara Islam Indonesia. Hasil Pemilu 1955 Partai Nasional Indonesia (PNI) 8,4 juta suara (22,3%),

Masyumi 7,9 juta suara (20,9%), Nahdatul Ulama 6,9 juta suara (18,4%), dan Partai Komunis Indonesia (PKI) 6,1 juta suara (16%). Di masa Orde Baru, diselenggarakan pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 (Tanuwidjaja, 2010: 29-49).

Pemilu 1971 diikuti 10 partai politik yaitu Partai Katolik Indonesia (607 suara, 3 kursi); Partai Syarikat Islam Indonesia (1.308.237 suara) 10 kursi; Nahdlatul Ulama 1971 (10.213.650 suara; 58 kursi); Partai Muslimin Indonesia (2.930.746 suara, 24 kursi); Partai Golongan Karya (34.348.673 suara, 236 kursi); Partai Kristen Indonesia (733.359 suara, 7 kursi); Partai Musyawarah Rakyat Banyak (49.000 suara; 0 kursi); Partai Nasional Indonesia-Massa Marhaen (3.793.266 suara, 20 kursi); Persatuan Tarbiyah Islamiyah (381.309 suara, 2 kursi); dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia suara 338.403 suara, tanpa perolehan kursi. Sebelum Pemilu 1977, Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia digabungkan pada tahun 1975 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, sehingga hanya menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

Seiring dengan penyederhanaan partai politik, PPP dibentuk dari gabungan partai-partai politik Islam yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi pada 5 Januari 1973. Hasilnya, sejak Pemilu 1971 sampai Pemilu 1997, Golkar mendominasi Pemilu yang tidak demokratis. Al-Hamdi menyebutkan bahwa PPP hanya memperoleh suara

27,1 persen pada pemilu 1971; 29,3 persen pada Pemilu 1977; 27,8 persen pada Pemilu 1982; 15,97 persen pada Pemilu 1987; 17 persen pada Pemilu 1992, dan 22,4 persen pada Pemilu 1997 (Al-Hamdi, 2013: 89).

Demikian pula, Prosentase Pemilu 1999 sampai Pemilu 2014 jumlah Partai politik berbasis agama tidak mencerminkan hasil mayoritas suara dalam perolehan hasil pemilu. PKS, PPP, PKB, PBB, diklasifikasikan sebagai partai menengah bawah. Pemilu 1999 PK/PKS hanya mendapatkan suara 1,36 persen, PPP, 10,72 persen, PKB 12,62 persen, PBB 1,94 atau total 26 persen saja. Pada Pemilu 2004, jika digabungkan prosentasi suara partai-partai politik Islam hanya mengalami kenaikan sekitar 28,68 persen. Sedangkan pada Pemilu 2009, jika ditotalkan justru menurun menjadi 19,93 persen, dan sedikit mengalami kenaikan pada Pemilu 2014 sehingga ditotalkan seluruhnya menjadi 23,82 persen.

Analisis lainnya oleh Haris menjelaskan ada dua faktor yang menyebabkan kekalahan partai politik berbasis agama yaitu faktor internal partai politik dan faktor eksternal partai. Faktor internal partai menjelaskan tentang kegagalan terhadap inkonsistensi partai dalam mengadopsi struktur organisasi modern yang rasional atau sebaliknya mengadopsi struktur otoritas dalam agama. Masalah internal lainnya berupa polarisasi politik dan kepemimpinan, personalisasi kepemimpinan, dan konflik kepemimpinan. Demikian pula identitas dan disorientasi ideologis agama dalam karakter kebijakan partai terhadap rumusan secara komprehensif dan implementatif dengan fakta

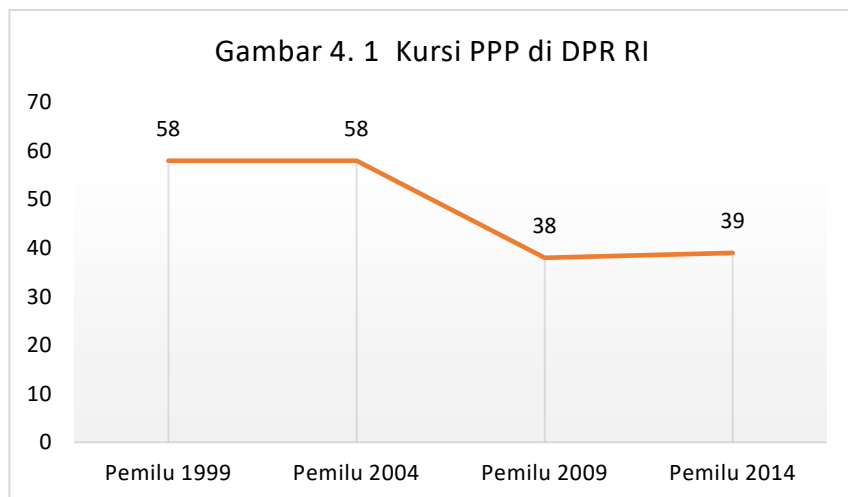
sosiologis keagamaan di Indonesia (Haris dalam Nurhasim, 2016: 272-294).

Selain itu partai-partai politik berhaluan Nasionalis sekuler melakukan islamisasi parpol nasionalis dengan cara membentuk struktur sampiran yang berlabel Islam dalam partai Golkar membentuk Majelis Dakwah Islami, Pengajian Al-Hidayah, Satuan Karya Ulama; Partai Demokrat mendirikan Aliansi Nasional Religius (ANR), Badan Silaturahmi Ulama dan Umarah (Bakosiru); PDI-P memiliki organisasi Baitul Muslimin; Gerindra mendirikan Gerakan Muslim Indonesia Raya (Nurhasim, Ibid. 272-294). Sisi lainnya Arifianto menyebut Partai politik Islam cenderung terpecah-belah, dan terbatas ruang geraknya hanya pada wilayah basis konservatif (Arifianto dalam Fionna, 2015: 129-130).

4.1.1 Sekilas PPP di Pentas Politik Nasional

Pemberangusan kekuatan politik di awal berdirinya Orde Baru, telah memposisikan partai-partai berhaluan ideologi Islam berhadap-hadapan dengan kekuatan politik militer Soeharto. penyederhanaan partai politik menghasilkan keputusan penggabungan partai politik. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 sebagai hasil dari penggabungan dari 4 partai politik di masa Orde Lama. Keempat partai politik itu adalah Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Penyatuan Fusi beberapa faksi partai politik beraliran ideologi Islam, oleh PPP mengklaim bahwa partai ini berperan sebagai “Rumah Besar Umat Islam.”

PPP telah mengikuti Pemilu 1977, 1982, 1987, 1892, dan 1997 di masa Orde Baru. Setelah Sistem Multi partai berlakukan, grafik perolehan kursi PPP semakin menurun dari pemilu ke pemilu. PPP meraih 58 kursi pada pemilu 1999. Demikian pula Pemilu 2004, PPP mampu mempertahankan 58 kursi sebagaimana pemilu 1999 sebelumnya. Namun pada pemilu 2009, PPP kehilangan 20 kursi, menyisakan 38 kursi. sedangkan pada pemilu 2014, partai ini memperoleh 39 kursi.



Sumber Data: LPU pemilu 1999, KPU Pemilu 2004-2014

Dalam pemilu 1999, PPP mengumpulkan 10,72 persen suara, hasil terbaik dibandingkan partai islam lainnya, namun 10 tahun kemudian, PPP mengalami kemerosotan perolehan suara hanya 5,01 persen pada pemilu 2009 yang disebabkan oleh dampak buruk faksionalisme yang menghambat koherensi

internalnya sejak Orde sehingga membatasi kapasitasnya dalam mengembangkan kadernya, organisasi, promosi, dan mobilisasi (.

Perpecahan internal PPP di level nasional di masa ketua Hamzah Haz sejak terbentuknya kekuatan PPP Reformasi di bawah pimpinan KH. Zainudin MZ sejak tahun 2002. Perpecahan ini berimplikasi pada terbentuknya Partai Bintang Reformasi (PBR). Selain itu PPP kembali mengalami perpecahan internal di bawah kepemimpinan Hamzah Haz 2005 yang terbagi dalam dua kubu antara pendukung Hamzah Haz dan pendukung yang mendorong gerakan pembaharuan dan perubahan. Tahun 2014 sebagai puncak konflik perpecahan dua faksi antara Kubu Djan Faridz dan M. Romahurmuzy (Budiarti, 2018: 7).

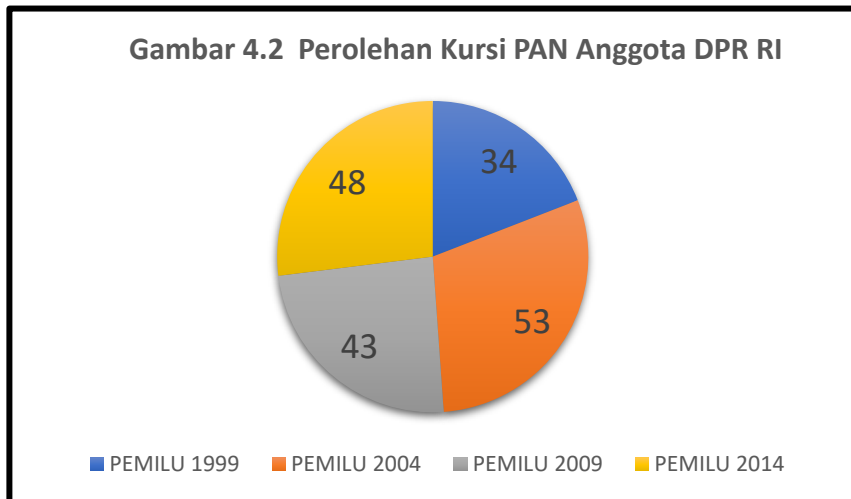
4.1.2 Sekilas PAN di Pentas Politik Nasional

Ketika Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan oleh kelompok yang menamakan dirinya Majelis Amanat Rakyat (MARA), sebuah perkumpulan pemikir, akademisi, wartawan dan praktisi ekonomi dan budayawan yang secara terang-terangan menentang kekuasaan rezim Orde Baru. Hasil pertemuan MARA merekomendasikan kepada Amien Rais agar segera membentuk partai politik yang memiliki semangat reformasi terhadap tatanan politik yang sudah rapuh. Dengan menggandalkan kekuatan think Tank reformasi, PAN mendeklarasikan sebagai salah satu partai yang tumbuh dari rahim reformasi pada 23 Agustus 1998 di Jakarta. Selain Amien Rais, terdapat tokoh-tokoh politik lainnya antara lain Goenawan Mohammad (wartawan Tempo), Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli (ekonom), Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim (Eks Menteri di Era Soeharto), Drs. Faisal Basri

(ekonom), M.A., A.M. Fatwa (Dai Politisi), Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao.

Berdasarkan Platform perjuangannya, PAN menegaskan tujuan partai sebagai sebuah kekuatan politik yang bercita-cita menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. tujuannya itu dapat dicapai jika modal sosial berdasarkan moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Tiga aspek penting dalam mendirikan PAN yaitu berpolitik harus berdasarkan pada moral agama. Demikian pula sebagai kelanjutan dari politik kemanusiaan, nilai-nilai perjuangan PAN tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemajemukan dipahami sebagai upaya menolak berbagai praktek yang merugikan kebersamaan seperti gerakan sektarian dan tindakan diskriminatif yang merusak tatanan politik yang santun.

PAN telah mengikuti Pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014. sebagai salah satu partai menengah, eksistensi partai masih di berada di bawah bayang-bayang ketokohan Amien Rais. Pada Pemilu 1999, PAN meraih 7.528.956 suara (7,1%) dengan 34 kursi dan berada di peringkat ke-5. Pada Pemilu 2004, PAN mengalami penurunan perolehan suara. Namun 7.303.324 suara, justru meraih 53 kursi. Pada pemilu 2009, PAN alami penurunan jumlah suara dan kursi. PAN meraih 6254.580 suara dan 43 Kursi. Pada pemilu 2014, PAN meraih 9.481.621 suara dengan 48 kursi.



Sumber: Data LPU pemilu 1999, Data KPU Pemilu 2004-2014

Partai ini pernah mengalami perpecahan internal setelah kelompok aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) menyatakan kekecewaannya lalu mendirikan sebuah Partai Matahari Bangsa (PMB) tahun 2006. Pendiri merangkap Ketua, Imam Addaruqutni (Mantan anggota DPR RI, mantan Ketua Umum DPP Pemuda Muhammadiyah), dan Ahmad Rofiq (Budiarti, *Ibid.*: 6).

4.1.3 Sekilas PKS di Pentas Politik Nasional

Reformasi membuahkan bangkitnya kembali politik aliran. Salah satu kehadiran politik aliran adalah Partai Keadilan yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 oleh Nurmahmudi Ismai'il dan beberapa kelompoknya di Jakarta. Uniknya, Partai Keadilan diresmikan di Aula Mesjid Al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta. Partai ini telah ikut pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014. Presiden

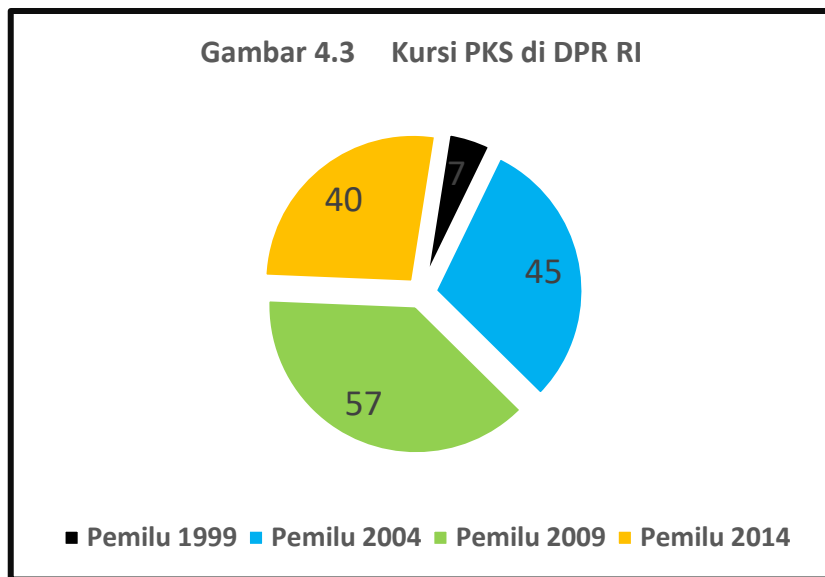
PKS pertama, Nurmahmudi Ismail diberikan jabatan sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan di bawah pemerintahan KH Abdurrahman Wahid. Sesuai dengan AD/ART, larangan rangkap jabatan diberlakukan. Nurmahmudi Ismail digantikan oleh Hidayat Nur Wahid pada tanggal 21 Mei 2000.

Hasil Pemilu 1999 tidak menguntungkan bagi Partai Keadilan. Pemberlakuan batas ambang minimal 2 persen bagi partai politik yang berhak ikut pemilu 2004 diberlakukan. PK kemudian membentuk partai baru pada tanggal 2 Juli 2003, dengan nama Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera). Pembentukan ini bertujuan agar mempermudah PKS dalam pemenuhan persyaratan administrasi dalam keikutsertaan sebagai peserta pemilu 2004.

Pemilu 1999, PK hanya meraih 7 kursi. Namun setelah PK berubah namanya menjadi PKS, partai ini memperoleh 45 kursi pada pemilu 2004. Selanjutnya pada pemilu 2009, PKS meraih 57 kursi. Pada Pemilu 2009, PKS hanya meraih 40 Kursi. terpuruknya kursi PKS berkaitan dengan gencarnya media memberitakan tentang keterlibatan Ketua PKS, Lutfi Hasan Ishak dalam dugaan kasus korupsi impor sapi. Kasus ini ternyata sangat mempengaruhi elektabilitas PKS. Sebagai Partai yang selalu mengedepankan nilai-nilai Keislaman, kasus Korupsi telah menurunkan kepercayaan masyarakat yang dibuktikan melalui hilangnya 17 kursi PKS.

PKS juga mengalami keretakan tahun 2016 dengan Fahri Hamzah, loyalis Annis Matta (Presiden PKS sebelumnya yang menggantikan ketua PKS Hasan Lutfi karena tersandung kasus impor sapi). Fahri hamzah tidak dimasukan di bawah

kepemimpinan Shohibul Iman. Annis Matta dan Fahri Hamzah lalu membentuk organisasi kemasyarakatan yang diberi nama GARBI (Gerakan Arah Baru Indonesia) di pertengahan tahun 2018. Kelompok ini berimbas di level daerah bagi kekuatan kaum muda yang sebelumnya telah beraktivitas di PKS. Sejak masih memimpin PKS, Annis Matta pernah menggagas tentang Arah Baru Indonesia (ABI) yang berisi tentang strategi lompatan Indonesia dalam memasuki era baru dalam 5 besar dunia.



Sumber: Data LPU pemilu 1999, Data KPU Pemilu 2004-2014

Imbas dari terlibatnya pengurus inti PKS di Ormas Garbi menuai pemecatan di antaranya Mahfudz Siddiq dan di beberapa pengurus wilayah antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat,

Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Demikian pula berlaku pemecatan di pengurus tingkat kabupaten/kota (Tempo Online: 18/10/2018).

4.2 Sekilas Dinamika PPP, PAN dan PKS pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 di Maluku Utara

Perihal yang sama juga berlaku di salah satu daerah, yaitu Maluku Utara. Perilaku politik kesukuan dalam teritorial etno-religius Maluku Utara berpengaruh terhadap pola rekrutmen elit partai yang modern. Namun perkembangan persaingan partai politik tidak tunggal, karena beberapa partai politik baru seperti Demokrat, PKS dan PDI-P juga menjadi pesaing serius terhadap keunggulan Golkar di Maluku Utara. Berdasarkan obyek pembahasannya, diuraikan eksistensi tiga partai politik di daerah yaitu PPP, PAN dan PKS.

Berdasarkan data perbandingan Hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, memperlihatkan stagnasi partai politik yang mengklaim sebagai partai yang berbasis agama mengalami penurunan perolehan jumlah kursi di DPRD Provinsi Maluku Utara. PKS stabil dalam perolehan kursi. Namun perolehan kursi PBB, PAN, dan PPP pada pemilu 2009 tidak mampu dipertahankan di pemilu 2014. Unggulnya partai politik yang lebih terbuka dapat dilihat pada kemampuan Golkar, PDI-P, NASDEM, HANURA, GERINDRA mampu menjaga trend jumlah kursi. Sebagai perbandingan Perolehan kursi hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 seluruh partai untuk anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sebagai berikut. Golkar pada pemilu 2009 meraih 10 kursi, namun pada pemilu 2014 hanya mendapatkan Kursi. PDI-P meraih 5 kursi pada

pemilu 2009, tetapi meningkat 7 kursi pada pemilu 2014. PBB meraih 5 kursi pada pemilu 2009, namun menurun menyisakan 3 kursi pada pemilu 2014.

Partai Demokrat meraih 5 kursi, tetapi pada pemilu 2014 hanya 3 kursi. PKS dari 4 kursi pada pemilu 2009, berhasil meraih 5 kursi pada pemilu 2014. PAN pada pemilu 2009 meraih 4 kursi, namun pada pemilu 2014 hanya meraih 3 kursi. PPP meraih 2 kursi pada pemilu 2009, tetapi mengalami penurunan menyisakan 1 kursi di pemilu 2014. Hanura meraih 2 kursi pada pemilu 2009, lalu berhasil meningkatkan jumlah kursi sebanyak 4 orang pada pemilu 2014.

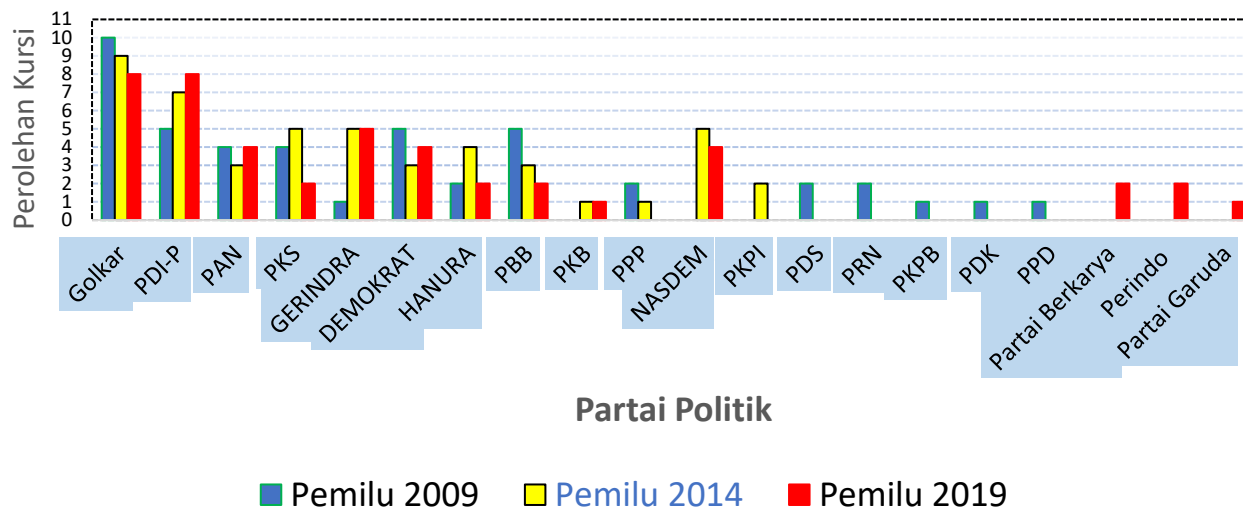
Gerindra pada pemilu 2009 hanya meraih 1 kursi, namun melejit menjadi 5 kursi pada pemilu 2014. Partai Nasdem pertama kali mengikuti pemilu 2014 langsung melejit mendapatkan 5 kursi. partai baru lainnya PKPI pada pemilu 2014 meraih 2 kursi. Sedangkan PKB pada pemilu 2014 meraih 1 kursi, dimana sebelumnya tidak memiliki kursi pada pemilu 2009. Partai-partai kecil yang mendapatkan kursi pada pemilu 2009 antara lain PDS 2 kursi, PRN 2 kursi, PKPB 1 kursi, PDK 1 kursi, PPD 1 kursi. Partai-partai gagal ikut pemilu 2014.

Sedangkan untuk Hasil Pemilu 2019, PDI-P memperoleh suara terbanyak dengan 103.472 suara (8 kursi), Golkar meraih 94.145 suara (8 kursi), Gerindra masih tetap mempertahankan posisinya pada urutan dengan perolehan suara 54.858 suara (5 kursi), Demokrat mendapatkan 53.096 suara (4 kursi), Nasdem 48.239 suara (4 kursi), PAN 40.779 suara (4 kursi), PKS 41.700 suara (2 kursi), Hanura 33.091 suara (2 kursi), Perindo 30.867 suara (2 kursi), PBB 23.267 suara (2 kursi), Berkaya 23.077 suara

(2 kursi), PKB 30.360 suara (1 kursi), dan Partai Garuda 27.387 suara (1 kursi).

Munculnya partai politik baru Partai Perindo, Partai Berkarya dan Partai Garuda mampu meraih kursi. Hasil pemilu 2019 juga ini mencerminkan fluktuasi partai berbasis agama dalam perolehan kursi. PAN mengalami kenaikan 1 kursi, sedangkan PKS terpuruk dari 5 kursi pemilu 2015 hanya menyisakan 2 kursi pada pemilu 2019. PPP yang memiliki 1 kursi di pemilu 2014, kini justru semakin terpuruk tanpa kursi berdasarkan hasil pemilu 2019. Demikian pula Partai Hanura kehilangan 2 kursi dari 4 kursi pemilu 2014.

Gambar 4.4. Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Provinsi Maluku Utara Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019



Sumber: KPU Provinsi Maluku Utara Pemilu 2009, 2014 dan 2019